



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL (BKPM)

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI PENANAMAN MODAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI ROMAYAH
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 519822

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/45 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/45 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m²/70 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m²/40 m² di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 22.000.000

1. MOTOR, HONDA KIH02N14LOA/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11BF1CBAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, POLYTRON PEV 30,1 AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 15.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 302.500.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---



Sub Total	Rp.	2.639.500.000
III. HUTANG	Rp.	699.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.940.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.